

Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bengkulu

Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Policy in Bengkulu Province

Yoan Berliana Siregar^{1*}, Muhamad Anggi Pratama², Fariz Antonius Azhari³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, 38371, Indonesia

Article info: Research Article

Abstrak

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan, BSPS,
Perumahan Layak Huni

Keywords:

*Policy Implementation, BSPS, Decent
Housing*

Article history:

Received: 11-11-2025

Accepted: 04-12-2025

*Koresponden email:

yoanberlianasiregar@unib.ac.id

(c) 2025 Yoan Berliana Siregar,
Muhamad Anggi Pratama, Fariz
Antonius Azhari



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan BSPS di Provinsi Bengkulu menggunakan teori Edward III dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, fasilitator lapangan, dan penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BSPS di Provinsi Bengkulu berjalan cukup efektif dengan pencapaian target fisik mencapai 95%, namun masih terdapat kendala pada aspek komunikasi sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya tenaga fasilitator, dan koordinasi antar instansi yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas program BSPS di masa mendatang.

Abstract

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is a government policy to improve access to decent housing for low-income communities. This study analyzes the implementation of the BSPS policy in Bengkulu Province using Edward III's theory with four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative research method was employed with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation from informants including the Housing Provision Working Unit, field facilitators, and beneficiaries. The results show that BSPS implementation in Bengkulu Province is quite effective with physical achievement reaching 95%, but there are still obstacles in socialization communication aspects that are not evenly distributed, limited facilitator resources, and inter-agency coordination that needs improvement. This study recommends the need to increase human resource capacity, optimize monitoring and evaluation systems, and strengthen cross-sector coordination to improve the effectiveness of the BSPS program in the future.

Kutipan: Siregar, Y. B., Pratama, M. A., & Azhari, F. A. (2025). Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Policy in Bengkulu Province. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), 62–68.

1. Pendahuluan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang layak dan bermartabat. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia khususnya yang berpenghasilan rendah belum memiliki akses terhadap rumah yang layak huni. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 11,4 juta rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni dengan berbagai kondisi seperti lantai tanah, dinding non-permanen, dan atap yang bocor (BPS, 2023).

Merespon permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018. Program BSPS bertujuan memberikan stimulan berupa bantuan dana dan material kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas rumah mereka secara swadaya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020). Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat (Jois et al., 2024).

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran program BSPS dengan jumlah RTLH yang cukup signifikan. Berdasarkan data Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu tahun 2023, terdapat lebih dari 15.000 unit RTLH yang tersebar di 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi yaitu 14,89% (Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Bengkulu, 2023). Implementasi program BSPS di Provinsi Bengkulu telah berjalan sejak tahun 2018 dengan target penurunan RTLH sebesar 30% dalam kurun waktu lima tahun. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial budaya masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi program BSPS menunjukkan hasil yang beragam. Farida (2020) di Kabupaten Subang menemukan bahwa implementasi BSPS belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, Mulyadi (2020) mengidentifikasi bahwa disposisi pelaksana dan struktur birokrasi menjadi faktor kunci keberhasilan program. Di sisi lain, Jois et al., (2024) menemukan bahwa program BSPS berhasil meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di Kabupaten Muna meskipun menghadapi kendala terkait ketepatan waktu pelaksanaan. Menurut (Sekarvilia & Karsinah, 2020) Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Tempuran, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang menunjukkan keberhasilan sebesar 73% pada variabel dan target standar, 73% pada kapasitas kelembagaan, 86% pada pembiayaan, dan 44% pada kondisi sosial dan politik

Berdasarkan latar belakang tersebut, masih terdapat kesenjangan (*research gap*) terkait bagaimana implementasi kebijakan BSPS di Provinsi Bengkulu yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Penelitian ini menjadi penting mengingat belum banyak kajian mendalam yang menganalisis implementasi BSPS di Provinsi Bengkulu secara komprehensif menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dengan fokus pada wilayah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai representasi daerah perkotaan dan perdesaan. Penelitian dilakukan pada periode Juli hingga Oktober 2024. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki jumlah penerima BSPS yang cukup signifikan

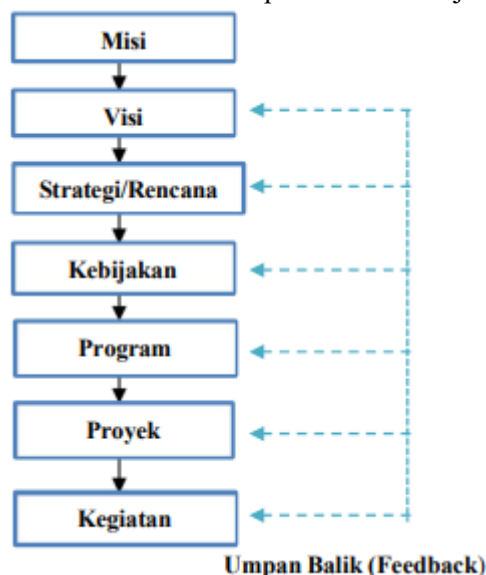
dan representatif untuk menggambarkan implementasi program di Provinsi Bengkulu (Creswell, 2016).

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi program BSPS. Informan penelitian terdiri dari: (1) Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BSPS, (3) Tim Fasilitator Lapangan (TFL) sebanyak 4 orang, (4) Koordinator Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang, (5) Perangkat Desa/Kelurahan sebanyak 3 orang, dan (6) Penerima manfaat BSPS sebanyak 6 orang yang tersebar di berbagai lokasi. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang yang dianggap telah memenuhi prinsip kecukupan dan kelayakan data (Moleong, 2000).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur kepada seluruh informan untuk menggali informasi terkait implementasi program BSPS. Kedua, observasi langsung ke lokasi pelaksanaan program untuk melihat kondisi riil di lapangan termasuk proses pembangunan dan hasil fisik rumah yang telah selesai dibangun. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen-dokumen terkait seperti Peraturan Menteri PUPR, Petunjuk Teknis BSPS, data penerima manfaat, laporan pelaksanaan kegiatan, dan foto-foto dokumentasi kegiatan (Sugiyono, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, (3) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang disertai dengan tabel dan gambar untuk mempermudah pemahaman, dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh (Milles & Huberman, 1992). Kerangka konseptual penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai pisau analisis untuk mengkaji implementasi program BSPS di Provinsi Bengkulu.

Gambar 1. Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber: Nugroho (2023)

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bengkulu dianalisis menggunakan empat variabel utama teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya untuk masing-masing variabel tersebut.

Komunikasi dalam Implementasi BSPS

Komunikasi merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan karena menentukan bagaimana informasi kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan target sasaran (Nugroho, 2023). Dalam konteks program BSPS di Provinsi Bengkulu, aspek komunikasi mencakup transmisi informasi kebijakan, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transmisi informasi kebijakan BSPS di Provinsi Bengkulu telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Kementerian PUPR, Satuan Kerja Provinsi, Koordinator Kabupaten/Kota, hingga Tim Fasilitator Lapangan.

Sosialisasi program kepada masyarakat calon penerima manfaat dilakukan melalui berbagai media seperti rapat koordinasi, pertemuan di tingkat desa/kelurahan, dan kunjungan langsung ke calon penerima. Namun ditemukan bahwa sosialisasi belum merata ke seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini sejalan dengan temuan Herdiana (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi kebijakan publik harus dilakukan secara komprehensif dan merata agar semua pemangku kepentingan memahami tujuan dan mekanisme program.

Kejelasan informasi program BSPS yang disampaikan kepada penerima manfaat cukup baik, mencakup kriteria penerima, besaran bantuan, spesifikasi teknis bangunan, dan kewajiban penerima. Namun, beberapa penerima mengaku masih kesulitan memahami dokumen teknis karena menggunakan bahasa yang terlalu formal. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif, serta pemanfaatan media visual seperti poster dan video tutorial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat sering menyebabkan pelaksanaan BSPS kurang optimal, sehingga peningkatan literasi teknis dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program (Baldor et al., 2023). Di sisi lain, pendekatan partisipatif dan koordinasi antarlembaga juga terbukti mampu memperkuat implementasi dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat (Wiratmoko & Wiro, 2025). Dengan demikian, optimalisasi penyampaian informasi melalui media yang lebih mudah dipahami dan peningkatan peran pendamping lapangan sangat penting untuk mewujudkan tujuan utama program BSPS, yaitu pemberdayaan masyarakat agar mampu membangun rumah layak huni secara mandiri.

Sumber Daya dalam Implementasi BSPS

Sumber daya merupakan faktor penting yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif (Dewi, 2022). Dalam implementasi BSPS di Provinsi Bengkulu, sumber daya manusia yang terlibat meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Kot), Tim Fasilitator Lapangan (TFL), dan tenaga teknis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah TFL yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat yang harus didampingi.

Tabel 1 berikut ini menunjukkan rasio fasilitator terhadap jumlah penerima manfaat BSPS di Provinsi Bengkulu tahun 2023.

Tabel 1. Rasio Tim Fasilitator Lapangan terhadap Penerima Manfaat BSPS

No	Wilayah	Jumlah TFL	Jumlah Penerima	Rasio
1	Kota Bengkulu	8	245	1:31
2	Bengkulu Tengah	6	312	1:52
3	Total	14	557	1:40

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa rasio TFL terhadap penerima manfaat berkisar 1:31 hingga 1:52, yang berarti satu TFL harus mendampingi 31-52 penerima manfaat. Kondisi ini menyebabkan pendampingan menjadi kurang optimal terutama dalam memberikan bimbingan teknis pembangunan. Standar ideal rasio fasilitator menurut Petunjuk Teknis BSPS adalah 1:25 untuk memastikan kualitas pendampingan yang memadai (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020).

Dari aspek anggaran, program BSPS di Provinsi Bengkulu tahun 2023 memiliki alokasi dana sebesar Rp 11,5 miliar untuk 557 unit rumah dengan besaran bantuan Rp 17,5 juta per unit untuk bangunan baru dan Rp 10 juta untuk rehabilitasi. Pencairan anggaran berjalan lancar meskipun ada

sedikit keterlambatan di awal tahun karena proses administrasi. Fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan peralatan kerja TFL sudah tersedia meskipun masih terbatas jumlahnya. Sistem informasi monitoring dan evaluasi telah dibangun menggunakan aplikasi Simonev BSPS yang memudahkan pelaporan dan pengawasan kegiatan secara real-time.

Disposisi Pelaksana Program

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi (Nugroho, 2023). Dalam konteks BSPS, disposisi mencakup komitmen, kejujuran, dan dedikasi para pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana program BSPS di Provinsi Bengkulu secara umum sudah baik. Tim Fasilitator Lapangan menunjukkan dedikasi tinggi dengan seringkali bekerja melampaui jam kerja normal untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai spesifikasi teknis.

Komitmen aparatur pelaksana tercermin dari pencapaian target program yang mencapai 95% dari yang direncanakan. Namun, masih ditemukan beberapa kasus di mana terdapat perbedaan pemahaman antara TFL dengan penerima manfaat terkait spesifikasi teknis bangunan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan standarisasi pendampingan. Dari sisi integritas, tidak ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau korupsi yang berarti. Hal ini didukung oleh sistem pengawasan berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa sikap jujur dan dedikasi tinggi dari pelaksana kebijakan mampu menciptakan tata kelola program yang bersih dan akuntabel (Tjajja et al., 2021).

Struktur Birokrasi dan Koordinasi

Struktur birokrasi yang efektif dengan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas merupakan prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan (Nugroho, 2023). Struktur organisasi pelaksana BSPS di Provinsi Bengkulu sudah cukup jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi. Hirarki pelaksanaan dimulai dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan sebagai penanggung jawab program, kemudian Koordinator Kabupaten/Kota, TFL di tingkat kecamatan, hingga Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di tingkat desa/kelurahan.

Koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pemerintah desa/kelurahan sudah berjalan meskipun masih perlu ditingkatkan. Rapat koordinasi rutin dilaksanakan setiap bulan untuk membahas progress pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. Namun, koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pengadaan material masih belum optimal, sehingga terkadang terjadi keterlambatan distribusi material ke lokasi.

Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan BSPS sudah tersedia dan mengacu pada Petunjuk Teknis dari Kementerian PUPR. SOP mencakup tahapan mulai dari pendataan calon penerima, verifikasi, penetapan penerima, pencairan dana, pelaksanaan pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Meskipun demikian, beberapa TFL mengungkapkan bahwa SOP terkadang kurang fleksibel untuk mengakomodasi kondisi lapangan yang beragam, terutama terkait dengan kendala geografis dan budaya lokal (Sulubara, Riska, et al., 2024).

Capaian dan Kendala Implementasi

Implementasi program BSPS di Provinsi Bengkulu telah mencapai hasil yang cukup memuaskan dengan tingkat penyelesaian fisik mencapai 95% dari target yang ditetapkan. Dari 557 unit rumah yang menjadi target tahun 2023, sebanyak 529 unit telah selesai dibangun dengan kualitas yang memenuhi standar teknis minimal. Dampak positif program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima juga terlihat signifikan, dimana kondisi rumah yang layak huni berkontribusi pada peningkatan kesehatan keluarga dan produktivitas ekonomi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Pertama, keterbatasan jumlah tenaga fasilitator menyebabkan kurang optimalnya pendampingan teknis kepada penerima manfaat. Kedua, sosialisasi program yang belum merata terutama di daerah terpencil mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini. Ketiga, keterlambatan distribusi material bangunan yang disebabkan oleh faktor geografis dan infrastruktur jalan yang belum memadai di beberapa lokasi. Keempat, partisipasi swadaya masyarakat yang masih

rendah di beberapa wilayah karena keterbatasan ekonomi dan budaya gotong royong yang mulai memudar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aziz et al. (2023) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya fasilitator dan sosialisasi yang belum optimal menjadi kendala utama dalam implementasi BSPS di Jawa Timur. Demikian pula penelitian Sulubara et al. (2024) menegaskan pentingnya sosialisasi yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program BSPS. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya perbaikan yang sistematis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar implementasi program dapat lebih optimal di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bengkulu secara umum berjalan cukup efektif dengan pencapaian target fisik mencapai 95%. Dari perspektif empat variabel teori Edward III, variabel komunikasi menunjukkan bahwa transmisi informasi kebijakan telah berjalan secara berjenjang namun sosialisasi kepada masyarakat masih belum merata terutama di daerah terpencil. Variabel sumber daya mengindikasikan bahwa keterbatasan jumlah Tim Fasilitator Lapangan dengan rasio yang tidak ideal menjadi kendala utama dalam optimalisasi pendampingan masyarakat.

Variabel disposisi menunjukkan bahwa komitmen dan dedikasi pelaksana program sudah baik yang tercermin dari pencapaian target program, meskipun masih diperlukan standardisasi pemahaman teknis di kalangan fasilitator. Sementara itu, variabel struktur birokrasi mengungkapkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab sudah cukup jelas dengan koordinasi yang berjalan rutin, namun koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi program BSPS di masa mendatang. Pertama, perlu dilakukan penambahan jumlah Tim Fasilitator Lapangan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkala untuk mencapai rasio ideal dan standardisasi pemahaman teknis. Kedua, optimalisasi sosialisasi program melalui berbagai media komunikasi termasuk media sosial dan melibatkan tokoh masyarakat lokal untuk menjangkau daerah terpencil. Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektor dengan membentuk forum koordinasi reguler yang melibatkan semua instansi terkait. Keempat, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif berbasis teknologi informasi untuk memudahkan pengawasan dan pengambilan keputusan. Kelima, mendorong revitalisasi budaya gotong royong dan penguatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Aziz, M. A., Bachtiar, A., & Asmara, K. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gedangan oleh Satker Penyediaan Perumahan Jawa IV. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 645–652. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10130378>
- Baldor, K., Ballo, F. W., & Tungga, C. A. (2023). Implementation of the Swadaya Housing Stimulant Assistance Program for Low-Income Communities in Rana Masak Village, Borong District. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(10), 2501–2508. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i10.6386>
- Bengkulu, S. K. P. P. P. (2023). *Annual Report Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya National Affordable Housing Program (BSPS NAHP)*. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 35–47. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3132>

- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 19–26.
- Jois, M., Kasim, S. S., & Sarpin. (2024). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Masyarakat Kurang Mampu di Desa Waara Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.52423/welvaart.v5i1.6>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744–754.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy* (6 (ed.)). Elex Media Komputindo.
- Rakyat, K. P. U. dan P. (2020). *Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2020*. Direktorat Jenderal Perumahan.
- Sekarvilia, M., & Karsinah, K. (2020). Implementation of Swadaya Housing Stimulant Assistance. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 650–669. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35954>
- Statistik, B. P. (2023). *Statistik Perumahan dan Permukiman Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Zainuddin, Z. (2024). Sosialisasi Arah Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Terintegrasi. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i2.2075>
- Sulubara, S. M., Riska, R., & Normawati, Y. I. (2024). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah: Masalah dan Solusi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(2), 99–108. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i2.2456>
- Tjajja, A., Sabir, M., Usman, M. H., & Samad, M. A. (2021). Good Hospital Governance at the Indonesian Hospital. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 554–561. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.64>
- Wiratmoko, D., & Wiro, M. (2025). Implementation of The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Improving The Quality of Housing and The Welfare of The Retok Village Community. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(6), 1910–1919. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i6.1729>